

# Investasi Untuk Aceh Mandiri



Ir. Nova Iriansyah, MT  
Plt. Gubernur Aceh

DI TENGAH tingkat persaingan global yang semakin meningkat, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah untuk menggaet lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah yakin dengan meningkatnya jumlah investasi akan membuat Aceh lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang sifatnya stimulan. Investasi dari berbagai arah,

terutama dari industri-industri kecil dan menengah yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Aceh.

Investasi juga diyakini dapat melahirkan industri baru serta melahirkan iklim bisnis yang kondusif, yang pada akhirnya akan berdampak kepada lahirnya lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Aceh.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagai salah satu daerah utama di Indonesia, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Aceh melakukan berbagai upaya dalam bentuk promosi po-

tensi daerah, kerjasama pemerintah di forum regional serta percepatan kemudahan perizinan, dan mendukung investasi lokal yang selama ini belum berkembang. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, pihaknya terus melakukan promosi investasi di semua lini baik ke luar Aceh maupun di dalam Aceh sendiri. Selain menggaet para investor besar di luar negeri, Pemerintah Aceh juga saat ini fokus dalam mendorong para pengusaha dari dalam Aceh untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

Nova ingin memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM) yang saat ini cukup banyak di Aceh, termasuk para pengusaha Aceh yang berada di Medan, Jakarta, dan daerah-daerah lainnya. "Saya mau potensi yang kita

punya dulu, mengajak pengusaha Aceh baik di Aceh maupun di luar untuk berinvestasi mulai dari kecil hingga menengah," katanya. Menurutnya, tak sedikit pengusaha Aceh yang seyogyanya sanggup untuk berinvestasi di kisaran 100 miliar ke bawah. Ini, kata Nova harus diperhatikan betul, karena mereka diyakini bisa membuat Aceh yang lebih mandiri. "Banyak pengusaha kita di luar yang mau sebenarnya, tapi selama ini mereka kurang disentuh saja. Lebih baik kita maksimalkan apa yang kita punya dulu kan, tidak usah berharap terlalu tinggi pada pengusaha di luar sana," kata Nova.

Nova mengatakan, untuk mendatangkan investor besar ke Aceh memerlukan waktu yang lama, dan para calon tenant tersebut tidak langsung berinvestasi ketika sudah ada perjanjian atau MoU. "Para investor

perlu kenyamanan, jaminan hukum, perizinan, keamanan, dan infrastruktur yang memadai. Banyak yang sudah MoU tapi semuanya masih belum beroperasi akibat belum adanya dukungan yang diharapkan," katanya.

Begitu pun, Pemerintah Aceh terus melakukan pembenahan di berbagai sektor salah satunya adalah dengan merevisi qanun/peraturan daerah penanaman modal, dengan memasukkan insentif, keringanan pajak dan berbagai kemudahan lain kepada calon investor serta reformasi perizinan yang kini terintegrasi secara elektronik (OSS).

Pemerintah Aceh juga mendorong keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan guna mendukung hadirnya iklim investasi kondusif di Aceh. Masuknya investasi akan mendorong penyebaran penanaman modal dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, mengembangkan investasi yang berwawasan lingkungan (green investment), meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah (UMKM) dan meningkatkan promosi penanaman modal.

Dalam Rancangan Qanun (Raqaq) Aceh tentang Penanaman Modal yang sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif Aceh, Pemerintah Aceh memuat ber-

bagai kebijakan penanaman modal di Aceh, di antaranya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam

perekonomian nasional dan internasional, mempercepat peningkatan Penanaman Modal, memberi perlakuan yang sama bagi semua pelaku usaha baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Menurut Nova, jika usaha kecil menengah atau industri-industri rumah tangga di Aceh berjalan dengan baik, tentu ini akan menjadi salah satu bahan kajian para investor besar datang ke Aceh. "Saya rasa skemanya begitu, kita akan terus bergerak menguat investasi kita baik dari dalam maupun dari luar," katanya.

Nova juga mengatakan, memang sudah saatnya Aceh menguatkan investasi, tidak bergantung lagi pada APBA dan APBK yang sifatnya stimulan. "Mungkin kalau APBA dan APBK ini sebagai pemancing saja, dana pemerintah yang sudah ada peruntukannya sendiri. Ya salah satu kuncinya memang investasi, termasuk investasi dari dalam, bukan hanya dari luar," pungkas Nova. (\*)

## Fokus Pada Agro Industri, UMKM dan Pengembangan Kawasan

KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Aceh, Aulia Sofyan mengatakan, pihaknya kini melakukan promosi dan kemudahan pelayanan perizinan kepada semua pelaku usaha tidak hanya kepada investor dari luar negeri, tetapi juga kepada pelaku usaha daerah dan nasional, terutama bagi para pelaku UMKM.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang mengedepankan penguatan para pelaku usaha kecil menengah yang saat ini berkontribusi besar dalam perputaran roda perekonomian Aceh.

"Kita sudah melakukan evaluasi dari beberapa hasil kajian, ke depan kita tidak terlalu muluk-muluk promosi investasinya saja, tetapi kita condong kepada meningkatkan minat pengusaha kita sendiri dengan memberikan mereka berbagai kemudahan perizinan," kata Aulia Sofyan.

Pemerintah Aceh juga mendorong para pemilik modal yang ingin berinvestasi dan berbisnis di Aceh agar bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta lembaga ekonomi syariah.



Dr. Aulia Sofyan  
Kepala DPM-PTSP Aceh/  
Kepala Administrator

"Intinya, Pemerintah Aceh sangat berkomitmen melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya," ujarnya.

Selain UMKM, menurut Aulia, pemerintah juga fokus pada sektor agro-industri dan pengembangan kawasan. Pada sektor pertanian, petani di Aceh menurut Aulia harus disentuh dan diberi fasilitas khusus agar menghasilkan produksi yang lebih unggul. Selanjutnya Pemerintah Aceh akan mendukung para pengusaha atau pengolah hasil pertanian untuk dapat memasarkan hasil pertanian yang sudah diolah ke pasar regional dan

global. "Ke depan kita akan menggalakkan lebih banyak perusahaan-perusahaan untuk mengalihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka kepada masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan UMKM," katanya.

Prioritas yang ketiga adalah pada sektor pengembangan kawasan industri khusus. Lulusan program doktor dari University of Queensland ini mengatakan saat ini di Aceh mempunyai beberapa kawasan khusus yang sangat menarik perhatian investor karena banyak kemudahan yang terdapat di dalamnya. Diantaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang, Kawasan Pelabuhan Internasional Perikanan Samudera Lampulo, dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang, Aceh Besar.

"Kesemuanya kawasan industri utama di Aceh dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat setempat agar para investor yang masuk dapat merasa nyaman melakukan kegiatan usaha mereka, sehingga dapat memberikan multiplier effect yang positif kepada masyarakat," imbaunya.

## Izin Usaha Mudah Dengan OSS

DALAM rangka mendukung upaya percepatan kemudahan berusaha, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Aceh, Dr. Aulia Sofyan menghimbau kepada semua pelaku usaha agar segera mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) secara online.

Caranya mudah, para pelaku usaha cukup membuka situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dan melakukan registrasi berdasarkan informasi yang tertera pada akte perusahaan dan KTP salah satu direksi

perusahaan, dan dalam hitungan menit jika informasinya semua lengkap sistem akan menerbitkan NIB.

"Jika masih mengalami kesulitan dalam mengakses OSS secara online, pelaku usaha dapat langsung ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdekat untuk dilayani penerbitan NIB-nya sampai selesai," kata Aulia.

NIB berfungsi sebagai satu nomor identitas yang terintegrasi yang sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanaan.

Menurut Aulia, Pemerintah Aceh mempunyai komitmen untuk menjadi propinsi yang terdepan dalam mengimplementasikan OSS sesuai dengan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga membuat regulasi yang memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas usaha.

"Saat ini semua jenis perizinan terkait usaha, seperti Izin Usaha, Izin Lokasi dan Izin Komersil lainnya dapat diakses melalui OSS yang terhubung dan terintegrasi

dengan seluruh kantor pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota," jelas Aulia.

Oleh karena, Aulia menghimbau kepada semua pelaku usaha untuk mempelajari sistem perizinan yang baru ini karena ianya memberikan banyak kemudahan dan waktu proses yang terukur dan pasti. "Tidak ada lagi kerumitan birokrasi dalam memperoleh perizinan karena sekarang dilakukan dengan sistem secara bertahap," pungkasnya.

## KERJASAMA REGIONAL TINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI

DENGAN memanfaatkan potensi letak geografis yang strategis serta sumber daya alam yang kaya, Pemerintah Aceh meningkatkan kerja sama dengan kawasan di negara sekitar. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam keanggotaan Kerjasama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Inisiatif Kerjasama Ekonomi Andaman-Aceh.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Aceh saat ini fokus pada pengembangan pariwisata dan peningkatan konektivitas udara dan maritim, seperti rencana penerbangan langsung dari Aceh ke Thailand, yaitu Krabi dan Phuket yang saat ini sedang digagas dengan pihak maskapai terkait.

Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Aceh, Dr. Aulia Sofyan mengatakan, pihaknya mendorong inisiatif tersebut karena Aceh memerlukan lebih banyak akses kepada calon wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Aceh. Salah satunya adalah dengan membuka jalur penerbangan internasional baru.

"Bayangkan jika kita mampu menyedot 1 persen saja dari pasar pariwisata yang ada di Thailand ke Aceh maka kunjungan wisatawan kita bisa meningkat sekitar 190.000 orang," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada pada Forum Gubernur IMT-GT pada 30 September 2018 lalu di Melaka menegaskan perlunya pening-

katan konektivitas di kawasan IMT-GT "Diharapkan percepatan pembukaan penerbangan langsung dari Aceh ke Krabi/Phuket karena Aceh memiliki peluang besar sebagai internasional hub terutama Sabang yang saat ini menjadi destinasi kapal pesiar internasional, di antaranya rute Phuket dan Langkawi. Oleh karena itu, perlu diperkuat kerja sama promosi wisata bahari segitiga emas Saphula (Sabang-Phuket-Langkawi) melalui pemuatan paket-paket wisata cruise bersama," ujar Nova.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong realisasi inisiatif kerja sama ekonomi dengan daerah Kepulauan Andaman dan Nikobar, India yang terletak hanya 70 Km dari daratan Aceh. Inisiatif

kerjasama ini dilakukan mengingat kedekatan geografis antara India dan Aceh serta peluang pengusaha Aceh untuk memasarkan produk unggulan daerah ke wilayah Andaman dipermudah. Kerja sama perdagangan ini bermanfaat untuk membuka konektivitas perdagangan Aceh dan India melalui Kepulauan Andaman yang saat ini sedang gencar membangun fasilitas infrastruktur pariwisata. Jarak geografis yang berdekatan antara Andaman dan Aceh membuat membuka peluang bagi pengusaha Aceh untuk memasok material yang dibutuhkan, diantaranya material konstruksi serta mendorong ekspor produk dan komoditi ke kawasan Andaman, terutama pangan dan perikanan.



Untuk informasi lanjut kunjungi situs web DPMPPTSP Aceh di: [dpmpptsp.acehprov.go.id](http://dpmpptsp.acehprov.go.id) | Layanan Perizinan Online Terintegrasi: [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

Ikuti kami di: [investinaceh](#) [investinaceh](#) [investinaceh](#)

## Selamat & Sukses

### ATAS PERESMIAN PENGOPERASIAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) ARUN LHOKESEUMAWE

#### OLEH BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# Ir. H. JOKO WIDODO

Di Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat, 14 Desember 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh  
Selaku Kepala Administrator KEK Arun Lhokseumawe

## Dr. Aulia Sofyan

drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc. GUBERNUR ACEH | Ir. H. NOVA IRIANSYAH, M.T. WAKIL GUBERNUR ACEH